



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021 DINAS KETAHANAN PANGAN



**KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2019**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen “Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 Dinas Ketahanan Kabupaten Malinau” dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat di bidang Ketahanan Pangan. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup bagi Pemerintah Kabupaten Malinau secara terpadu dan berkelanjutan.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan Ketahanan Pangan yang lebih baik di Kabupaten Malinau. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau serta semua pihak atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau ini diharapkan dapat memberikan Acuan dan Panduan bagi seluruh Pemangku Kepentingan, baik di Pusat maupun Daerah, dalam melaksanakan program dan kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan untuk mewujudkan Ketahanan Pangan sampai tingkat Perseorangan yang berlandaskan Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan secara berkesinambungan.

Malinau, September 2019

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,



H. Saparudin, S.Sos., M.Si
NIP.19640125 198601 1 003



DAFTAR ISI		Halaman
SK TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021.....		
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR GAMBAR		iii
DAFTAR TABEL		iv
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1. Latar Belakang.....		1
1.2. Landasan Hukum.....		2
1.3. Maksud dan Tujuan.....		4
1.4. Sistematika Penulisan		4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH		6
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan		6
2.2. Sumber daya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau.....		9
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau		14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau.....		18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN .		20
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan		20
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		21
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra		23
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....		27
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....		29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....		31
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau		31
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		33
5.1. Strategi dan Kebijakan		33
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		35
6.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan		
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....		43
7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021.....		43
BAB VIII PENUTUP.....		45
8.1 Kaedah Pelaksanaan		45
8.2 Dasar Evaluasi		46

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.....	8
Gambar Casciding Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau	48





DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.2.1 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Eselon	9
Tabel 2.2.2 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan	10
Tabel 2.2.3 Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Per 31 Desember 2015)	11
Tabel 2.3.1 Pencapaiagn Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2011-2016	13
Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2011-2016	16
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau	20-28
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021	32
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021	34
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021	38
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021	43



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada Tingkat Nasional maupun daerah hingga Tingkat perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan Sumber Daya, Kelembagaan, dan Budaya Lokal.

Sejalan dengan Amanat Undang- Undang Pangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 memprioritaskan peningkatan Kedaulatan Pangan sebagai salah satu sub agenda prioritas untuk mewujudkan agenda pembangunan Nasional yakni kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat Kedaulatan Pangan tersebut, maka kebijakan umum dalam RPJMN 2015 - 2019 diarahkan pada: (1) Pemantapan Ketahanan Pangan menuju Kemandirian Pangan dengan peningkatan Produksi Pangan Pokok; (2) Stabilisasi Harga Pangan; (3) Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat; (4) Mitigasi gangguan terhadap Ketahanan Pangan; dan (5) Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Dalam rangka pemantapan Ketahanan Pangan, pada Tahun 2016-2021 Dinas Ketahanan Pangan akan fokus pada ***Program Peningkatan Penguatan Keamanan Pangan yang Berbasis pada Komoditas Lokal.***

Pemantapan Ketahanan Pangan tersebut, harus berlandaskan Kemandirian dan Kedaulatan Pangan yang didukung oleh Subsistem Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan yang terintegrasi. Pencapaian Ketahanan Pangan yang mantap merupakan wahana penguatan stabilitas ekonomi dan politik, dan jaminan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau.



Upaya memantapkan Ketahanan Pangan menuju Kemandirian Pangan, menghadapi tantangan dan permasalahan yang berasal dari dalam Negeri maupun Luar Negeri. Pemenuhan Kebutuhan Pangan Pokok dari Produksi Dalam Negeri, dihadapkan pada permasalahan antara lain:

- a) Alih fungsi lahan pertanian Pangan ke komoditi non pangan dan pemukiman;
- b) Perluasan lahan Pertanian Pangan terkendala status kawasan Kehutanan (Hutan Negara);
- c) Anomali Iklim;
- d) Agribisnis pangan yang belum optimal, sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani.

1.2. Landasan Hukum

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk mengukur kinerja yang mengintegrasikan segenap keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang diharapkan mampu menjawab perkembangan lingkungan strategik, nasional, dan global dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau merancang rencana strategik secara bersama-sama antara pimpinan dengan seluruh bidang maupun seksi-seksi untuk selanjutnya diterapkan oleh segenap jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Paraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintah Bidang Pangan dan Bidang Pertanian;



- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas urusan Pertanian Daerah propinsi dan Kabupaten/ Kota;
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 , tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2 , tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau;

1.3. Maksud dan Tujuan

- Menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 menjadi visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau 2016-2021 yang disertai dengan indikator kinerja utama sebagai dasar pengendalian dan evaluasi.



- Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016-2021 disusun sebagai Acuan Pelaksanaan Kegiatan Jangka Menengah, untuk mewujudkan Pemantapan Ketahanan Pangan sampai Tingkat Perseorangan, yang tercermin dari menurunnya Jumlah Penduduk Rawan Pangan, stabilnya Harga dan Pasokan Pangan Pokok, dan meningkatnya Keanekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat. Renstra tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kegiatan Tahunan dengan memperhatikan Evaluasi Tahunan;
- Merupakan bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Malinau dalam kurun waktu Tahun 2016 – 2021 yang berkaitan dengan rencana pembangunan Dinas Ketahanan Pangan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan perencanaan strategik, dan sistematika pembahasan Rencana

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN

Menguraikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, dan menjelaskan Telaahan Visi, Misi, serta Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, serta menyusun Telaahan Renstra K/L d

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari program yang direncanakan serta kebijakan yang diterapkan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan cara pencapaian melalui perencanaan taktik dan teknik agar tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran hingga pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengungkapkan uraian singkat mengenai hasil yang diharapkan dari rencana program kedepan dengan adanya Rencana Strategik yang telah tersusun ini bagai keberhasilan pencapaian kinerja secara sempurna.

BAB VIII PENUTUP

Mengungkapkan uraian singkat mengenai hasil yang diharapkan dari rencana program kedepan dengan adanya Rencana Strategik yang telah tersusun ini bagai keberhasilan pencapaian kinerja secara sempurna.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

2.1.1 Tugas Pokok

Kabupaten Malinau terbentuk melalui Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, Selanjutnya pemerintah Kabupaten Malinau membentuk Dinas, Badan dan Instansi Teknis untuk menjalankan pemerintahan.

Kemudian dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 5) dan melalui Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43), maka secara resmi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Malinau berubah nomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang mempunyai tugas melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Pernaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43), maka Dinas Ketahanan Pangan adalah **membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.**



2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Ketahanan Kabupaten Malinau mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

2.1.3 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau terdiri dari:

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris, membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- b. Sub Bagian Umum

Unsur Pelaksana adalah bidang terdiri dari :

1. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Terdiri dari :

- a. Seksi Ketersediaan Pangan
- b. Seksi Sumber Daya Pangan
- c. Seksi Kerawanan Pangan

2. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Terdiri dari :

- a. Seksi Distribusi Pangan
- b. Seksi Harga Pangan
- c. Seksi Cadangan Pangan

3. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Terdiri dari :

- a. Seksi Konsumsi Pangan
- b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
- c. Seksi Keamanan Pangan

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Terdiri dari :

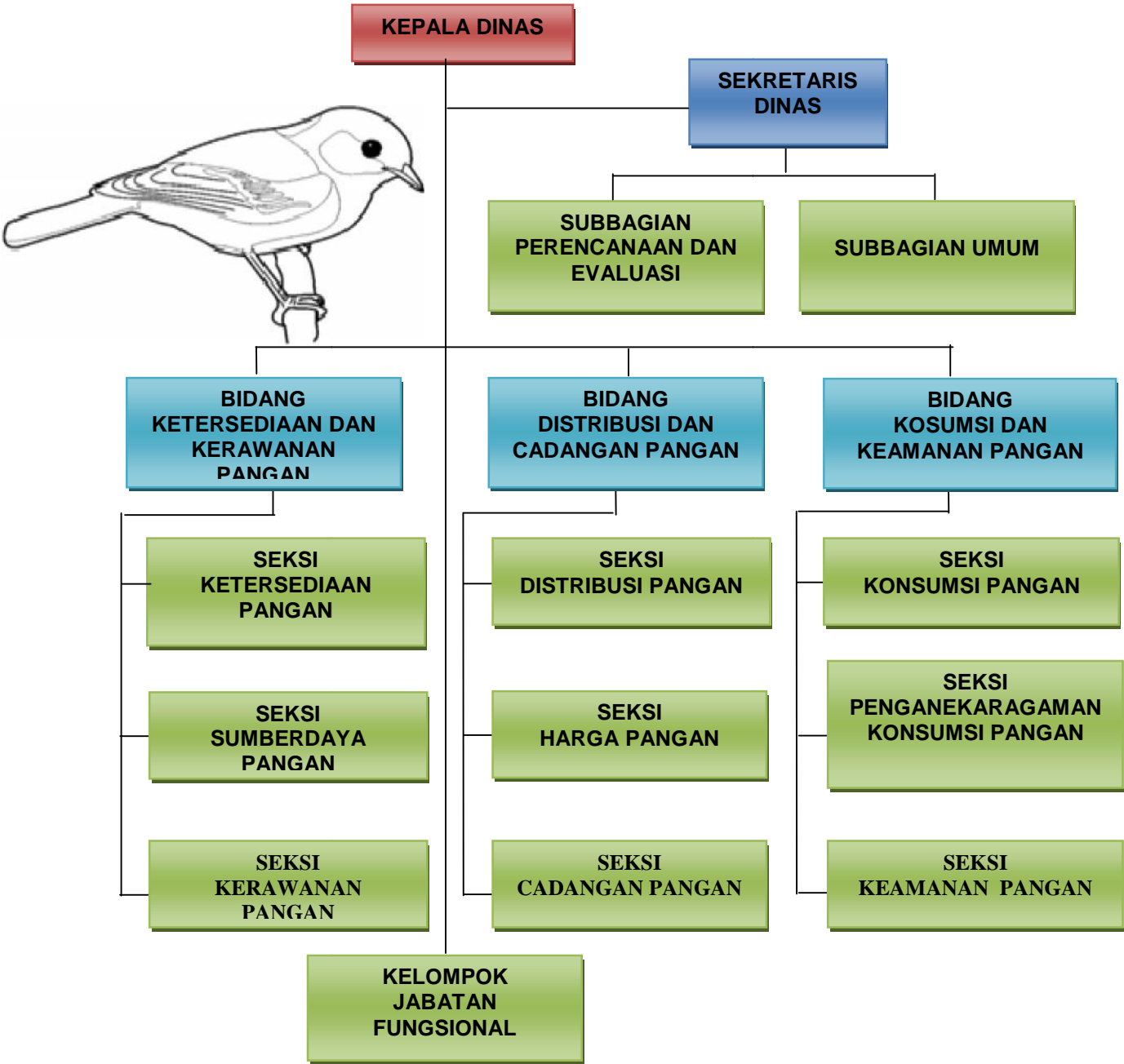
- a. Analis Ketahanan Pangan;
- b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
- c. Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
- d. Jabatan fungsional lainnya.



Adapun bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau mengacu pada Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah, yaitu :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau





2.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berikut ini adalah pemaparan mengenai data jumlah pegawai negeri sipil Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau yang dibedakan menurut golongan, eselon dan pendidikan. Pemaparan lebih lanjut akan dijelaskan melalui tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 2.2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering Dinas Ketahanan Pangan

No	Eselonering	Jumlah		Total
		Laki	Perempuan	
1	Eselon I	0	0	0
2	Eselon II a	1	0	1
3	Eselon III a	1	0	1
4	Eselon III b	1	2	3
5	Eselon IV a	6	5	11
6	Non Eselon / Staf	11	7	18
Jumlah		20	14	34

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas ketahanan Pangan Tahun 2018



2.2.2 Sumber Menurut Penddidkan

Secara rinci komposisi *SDM Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau* menurut *Tingkat Pendidikan* dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau										
SDM Menurut Tingkat Pendidikan										
No.	Uraian	Per 31 Desember 2018								
		Pendidikan								
		S3	S2	S1/ DIV	D III	D I	SLTA	SLTP	SD	JML
1	Struktural									
	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Kepala Bidang	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	Kepala Seksi	-	3	6	-	-	-	-	-	9
	Kepala Sub Bagian	-	1	1	-	-	-	-	-	2
	Sub Jumlah	-	8	8	-	-	-	-	-	16
2	Pegawai Non Struktural/Staf	-	-	3	5	-	8	-	1	17
	Sub Jumlah	-	-	3	5	-	8	-	1	17
3	Honorer PTT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Honorer Proyek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	8	11	5	-	8	-	1	33

Sumber : Suba Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018

2.2.3 Aset/Modal

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau dilengkapi dengan prasarana dan sarana berupa kendaraan dinas, inventaris, dan fasilitas lainnya. Adapun data inventaris prasarana dan sarana Dinas Ketahanan Pangan untuk kendaraan roda dua (motor) sifatnya masih pinjam pakai karena belum ada pelimpahan aset dari Dinas Pertanian kepada Dinas Ketahanan Pangan secara tertulis .



Seluruh aset yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan adalah aset dari Dinas Perkebunan (Dinas Perkebunan dilebur ke Dinas Pertanian) . Daftar aset Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.3
*Jumlah Aset Dinas Ketahanan Pangan
Kab.Malinau Tahun 2018*

No	Jenis	Jumlah
1	Lemari Arsip Besar	6 Buah
2	Meja	10 Buah
3	Kursi Sitone	27 Buah
4	Komputer	5 Unit
5	Printer	5 Unit
6	Meja Kepala Dinas	1 Set
7	Sofa diruang Kepa Dinas	1 Set
8	Kursi Citose	5 Buah
9	Lemari /Filing Kabinaet	4 Buah
10	Lemari Kecil	7 Buah

Sumber : Suba Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau

Sesuai dengan kewenangannya, peran pemerintah kabupaten / kota dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan masyarakat antara lain sebagai berikut :

- 1. Analisis Pengelolaan SPM
 - a. Identifikasi :
 - Potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.
 - Cadangan pangan masyarakat.
 - Kelompok rawan pangan.
 - Pangan pokok masyarakat.



b. Pembinaan

- Peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal.
- Pengembangan penganeekaragaman produk pangan.
- Monitoring cadangan pangan masyarakat.
- Pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat.

c. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat

- Menurunnya ketersediaan pangan.
- Penurunan akses pangan.

d. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kabupaten/kota.

e. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok tertentu tingkat kabupaten/kota.

f. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi, dan keamanan pangan.

g. Informasi harga di kabupaten/kota.

h. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan di Kabupaten/Kota. i. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat.

j. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan segar dan pabrik skala kecil/rumah tangga.



Untuk Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019 sesuai dengan capaian kinerja hasil dari akhir tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Produksi Komoditas Pangan dan Ketersediaan Energi dan Protein
Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Malinau Tahun 2019 (Angka tetap 2018)

No	Komoditas	Produksi (Ton)	Impor (Ton)	Total (Ton)
1	Beras	10.002	1.628	11.630
2	Jagung Kering	1.281	25	1.306
3	Kedelai	2	600	602
4	Kacang Tanah	3	32	35
5	Ubi Kayu	1.148	45	1.193
6	Ubi Jalar	8	28	36
7	Sayur	1.011	2.007	3.018
8	Buah-buahan	12.474	1.671	14.145
9	Minyak Goreng	-	823	823
10	Gula	-	1.016	1.016
11	Daging Sapi	16	2	18
12	Daging Ayam	497	209	706
13	Telur	20	1.370	1.390
14	Susu	-	859	859
15	Ikan	250	929	1.179
Jumlah		26.712	11.244	37.956

Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2019 (Angka Tatap 2018)

No	Konsumsi	Kal/Kap/Hari	Gram/Kap/Hari
1	Kalori/Energi	2.415	-
2	Protein	-	61,85

Sumber Data : Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan

Tabel 2.5
Capaian Pelayanan / IKK Dinas Ketahanan Pangan tahun 2019
(Angka Tetap 2018)

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
13	Ketahanan Pangan	50	Ketersediaan Pangan Utama	<u>Rata - rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun :</u>		
				11.630 Kg		
				79.903 Orang x 1000 (Jumlah Penduduk)	145,55 Kg/Orang	

Sumber Data : Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan



Tabel 2.6
Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan
Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Malinau Tahun 2019
(Angka tetap 2018)

No	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor Riil	Skor PPH	Skor Maks	Skor Riil terhadap Skor Maks
1	Padi-padian	1,598	72.65	0,5	36.3	25.00	25.00	+
2	Umbi-umbian	94	4.28	0,5	2.1	2.10	2.50	-
3	Pangan Hewani	140	6.35	2,0	12.7	12.70	24.00	-
4	Minyak dan Lemak	249	11.30	0,5	5.7	5.00	5.00	+
5	Buah / Biji Berminyak	22	1.01	0,5	0.5	0.50	1.00	-
6	Kacang-kacangan	83	3.75	2,0	7.5	7.50	10.00	-
7	Gula	125	5.66	0,5	2.8	2.50	2.50	+
8	Sayuran dan Buah	105	4.78	5,0	23.9	23.20	30.00	-
9	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		2,372	110		92.0	79.20	100	

Sumber Data : Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan

Rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan & Gizi (WNPG) x tahun 2012

Angka Kecukupan Gizi tingkat ketersediaan

Energi : 2.400 kkal/kap/hr

Protein : 63 gr/kap/hr

KETERANGAN :

1. Ketersediaan Energi Kalori /Kalori/Tahun adalah 2.372 Kalori/Hari, artinya asupan energy yang berasal dari karbohidrat, protein dan lemak masih kurang dari standar nasional yang ditetapkan yaitu 2.400 Kalori / Hari
2. Angka Prosentase Kecukupan Ekonomi sebesar 110 %, artinya prosentase angka kecukupan energy ketersediaan diperoleh dari energy dibagi dengan standar 2.400 Kalori / Hari masih kurang.
3. Terdapat nilai + atau kelebihan energi ketersediaan pada kelompok bahan Padi-padian dari skor Maksimal 25,00 yaitu tercapai 36,3 Kalori /Hari/Tahun dikarenakan meningkatnya produktivitas padi lokal untuk kebutuhan petani sendiri berupa beras konsumsi dan tidak di perjualbelikan (masyarakat umum perkotaan sebagian besar mengkonsumsi beras dari luar)
4. Skor PPH Ketersediaan 79,20 adalah masih dibawah SPM Nasional yaitu 83,2
5. Capaian Evaluasi Sasaran Riil tahun 2018 sebesar 92, 00 % dari Target Capaian 100% (Skor Maksimal / Nasional)



Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau :
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (Tabel 2.7)

Tabel 2.7

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Tahun 2019
berdasarkan Angka Tetap Tahun 2018 sebagai berikut :

Indikator Kerja Utama	Target PPH 2018	Target PPH 2019	Realisasi PPH 2018	% Capaian 2018	PPH 2017
PPH Ketersediaan					
Padi-padian	21,33	21,76	25,00	117%	25,00
Umbi-umbian	2,29	2,34	2,10	92%	2,50
Pangan Hewani	13,84	14,12	12,70	92%	11,10
Minyak dan Lemak	3,12	3,18	5,00	160%	5,00
Buah / Biji Berminyak	0,62	0,63	0,50	81%	0,60
Kacang-kacangan	10,09	10,29	7,50	74%	8,20
Gula	2,29	2,34	2,50	109%	2,50
Sayuran dan Buah	19,77	20,17	23,90	121%	23,20
JUMLAH	73,35	74,82	79,20	-	78,10

Sumber : Renstra dan Bidang Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan

Skor PPH Ketersediaan Target 73,35 dengan Capaian Evaluasi sebesar 79,20 dengan kelebihan peningkatan 107,98 % dikarenakan terdapat bahan Padi-padian dari skor Maksimal 25,00 yaitu tercapai 36,3 Kalori /Hari/Tahun karena meningkatnya produktivitas padi lokal untuk kebutuhan petani sendiri berupa beras konsumsi dan tidak di perjualbelikan (masyarakat umum perkotaan sebagian besar mengkonsumsi beras dari luar)



Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau

Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan																		
	1. Padi-padian	25,00	24,58	-	20.91	21.33	21.75	22.19	22.63	25,00	25.00	25,00	-	-	122%	118%	117%		
	2. Umbi-umbian	2,50	2,64	-	2.24	2.29	2.33	2.38	2.43	2,20	2.50	2,10	-	-	100%	110%	92%		
	3. Pangan Hewani	24,00	15,95	-	13.57	13.84	14.11	14.40	14.68	13,30	11.10	12,70	-	-	100%	80%	92%		
	4. Minyak dan Lemak	5,00	3,60	-	3.06	3.12	3.18	3.25	3.31	5,00	5.00	5,00	-	-	167%	161%	160%		
	5. Buah / Biji Berminyak	1,00	0,72	-	0.61	0.62	0.64	0.65	0.66	0,60	0.60	0,50	-	-	100%	97%	81%		
	6. Kacang-kacangan	10,00	11,63	-	9.89	10.09	10.29	10.50	10.71	9,70	8.20	7,50	-	-	100%	82%	74%		
	7. Gula	2,50	2,64	-	2.24	2.29	2.33	2.38	2.43	2,50	2.50	2,50	-	-	114%	110%	109%		
	8. Sayuran dan Buah	30,00	22,78	-	19.38	19.77	20.16	20.57	20.98	14,80	23.20	23,90	-	-	78%	118%	121%		
	9. Lain-lain	-		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-				
		100,00			71,91	73,35	74,82	76,31	77,84	73,10	78,10	79,20							

Sumber : IKU Dinas Ketahanan Pangan 2016-2021

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,



M. Saparudin, S.Sos., M.Si
NIP.19640125 198601 1 003



2. *Analisis Pengelolaan Pendanaan*

Mengacu pada pelaksanaan Renstra perencanaan tahun 2016 – 2021, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau. Berdasarkan pengalokasian anggaran dan pengelolaan pendanaan, dapat dilihat pada tahun mana saja rasio antara realisasi penyerapan anggaran dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, sebagaimana disajikan pada Tabel C-2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 sebagai berikut :



Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau

Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Peningkatan dan Kelancaran Kinerja Aparatur	52,00	50,50	51,27	53,17	53,77	52,00	50,50	51,27	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	14,00	14,00	14,51	11,35	-	14,00	14,00	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	133,55	-	-	-	-	133,55	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Melaksanakan Konsultasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketahanan Pangan	174,14	180,00	174,00	180,44	150,55	174,14	180,00	174,00	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-
Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	25,93	26,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur	-	-	-	29,04	30,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terlaksananya Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi	209,90	-	40,00	40,00	53,77	209,90	-	39,65	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-
Terlaksananya Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan	94,69	50,00	-	-	-	94,69	50,00	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-
Terlaksananya Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	-	-	70,00	60,00	107,55	-	-	69,76	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Terlaksananya Pembuatan Analisis Neraca Bahan Makanan	-	50,00	40,00	50,00	53,77	-	50,00	39,92	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
Terlaksananya Pemantauan ketersediaan dan kerawanan pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terlaksananya Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	-	-	25,00	25,99	53,77	-	-	25,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Optimalisasi dan Pemberdayaan Pemanfaatan Perkarangan Rumah	-	150,00	50,00	100,00	182,81	-	150,00	49,96	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-
Terlaksananya Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	18
Terlaksananya Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	63,48	-	30,00	30,00	53,77	63,48	-	29,38	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-
Meningkatkan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Pengelolaan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	128,52	100,00	-	100,00	107,55	128,52	100,00	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-
Terlaksananya Kajian Responsif dan Antisipatif Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	-	-	26,00	25,00	75,28	-	-	26,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Terlaksananya Pengembangan desa mandiri pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terlaksananya gerakan diversifikasi tanaman pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terlaksananya Pembangunan Lumbung Pangan Desa dan Lantai Jemur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terlaksananya Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terlaksananya Pengembangan sistem informasi pasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terlaksananya Penanganan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	143,60	140,00	40,00	40,00	64,52	143,60	140,00	39,19	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-
Terlaksananya Pembinaan/Sosialisasi tentang konsumsi panganan yang sehat beragam, bergizi daan seimbang	-	-	20,00	20,00	-	-	-	20,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
	999,88	734,50	580,27	794,08	1.025,46	999,88	734,50	578,16	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-

Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 dan LKJIP Dinas Ketahanan Pangan tahun 2017-2018

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,

H. Sagarudin, S.Sos., M.Si
 NIP. 19640125 198601 1 003



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Malinau

2.4.1. Tantangan Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau :

- Perlunya peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur pada Dinas Ketahanan Pangan.
- Masih belum optimalnya penyediaan sarana prasarana pelaksanaan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan .
- Masih terbatasnya Aparatur Dinas Ketahanan Pangan sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal.

Tabel 2.14

Indikator Tantangan Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau

No.	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1	Masih terbatasnya Sumberdaya Apartur Dinas Ketahanan Pangan	25	4	1,00
2	Terbatasnya sarana dan prasarana operasional Dinas Ketahanan Pangan	25	4	1,00
3	Masih terbatasnya Aparatur Dinas Ketahanan Pangan sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal.	25	4	1,00
	TOTAL	75		3

Sumber : Analisis Swoot Dinas Ketahanan Pangan tahun 2016-2021

2.4.2 Peluang Pengembangan pada Bidang Ketahanan Pangan

Peluang yang bisa dimanfaatkan dalam proses pengembangan pada Bidang Ketahanan Pangan pada masa yang akan datang :

- Potensi aparatur pada Dinas Ketahanan Pangan yang memadai.
- Adanya Kebijakan Otonomi Daerah untuk mengelola sumber daya alam sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Daerah.
- Adanya dukungan dari Kepala Daerah untuk mengelola sumber daya alam sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Daerah.
- Komoditas Pertanian yanag beraneka ragam dan merupakan produk unggulan Lokal Daerah.



Tabel 2.15

Indikator Peluang Pengembangan pada Bidang Ketahanan Pangan

No.	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1	Adanya Kebijakan Otonomi Daerah untuk Mengelola Sumber Daya Alam Sesuai Kondisi dan Kebutuhan Daerah.	25	4	1,00
2	Adanya Dukungan Dari Kepala Daerah dalam Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Produk Unggulan Desa.	25	4	1,00
3	Komoditas Pertanian Yang Beraneka Ragam yang memiliki Kualitas dan Berdaya saing.	25	4	1,00
4	Adanya Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan dengan Stakeholder	25	4	1,00
	TOTAL	100		4,00

Sumber : Analisis Swoot Dinas Ketahanan Pangan tahun 2016-2021



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau bertugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan Bidang Ketahanan Pangan.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau di dibentuk pada bulan Januari 2017. Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengisi formasi jabatan pada masing – masing bidang baru pejabat eselon III dan eselon IV sedangkan staf untuk masing – masing kepala seksi belum ada.

Untuk mengetahui permasalahan pada pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terpenuhinya Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan yang maksimal kepada Masyarakat	Jumlah PNS = 16 Orang <ul style="list-style-type: none">- Kepala Dinas- Sekretaris- Kepala Bidang 3 Orang (3 Bidang)- Kepala Seksi 9 Orang (3 Bidang)	Indikator Lainnya	Internalisasi	Kurangnya staf di pada masing – masing Kepala seksi yang dikeluarkan oleh BKD	Tidak terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat karena terbatasnya aparatur Dinas Ketahanan Pangan
	Sarana dan prasarana operasional Dinas Ketahanan Pangan belum Optimal/tersedia	Indikator Lainnya	Internalisasi	Belum adanya penambahan sarana operasional Dinas (Perlengkapan kantor dan sarana pendukung lainnya	Tidak terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat karena terbatasnya Sarana Operasional Dinas Ketahanan Pangan
	Kemampuan/Keterampilan Aparatur Dinas Ketahanan Pangan belum Optimal	Indikator Lainnya	Internalisasi	Perlu adanya pelatihan sesuai dengan bidang tugas masing – masing aparatur	Tidak terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat karena terbatasnya Kinerja/Keamampuan Aparatur Dinas Ketahanan Pangan

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan



Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan hambatan pada pelayanan kinerja Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Malinau karena belum tersedianya jumlah PNS (Aparatur), masih terbatasnya sarana operasional Dinas serta minimnya pengetahuan Aparatur Dinas Ketahanan Pangan. Hal tersebut di karena Dinas Ketahanan Pangan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati No 43 Tahun 2016. Yang disahkan/dikukuhkan pada tanggal 12 Januari 2017.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sangat dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah, dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Malinau sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.

Visi Kabupaten Malinau adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun”

Sesuai dengan visi Kabupaten Malinau, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik;
2. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalaman maupun perbatasan;
4. Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa;



5. Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: ***“one village one product”*** dengan semboyan ***“Bertani Sehat”***;
6. Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai Pusat Pemerintahan, Pusat Perdagangan, dan Pusat Industri Barang dan Jasa;
7. Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi;
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumber daya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi;
9. Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien;
10. Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah;
11. Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah melalui pendidikan dan pelatihan;
12. Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Telaahan terhadap visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau yang ditunjukkan dengan pelaksanaan misi ke 5 (delapan) RPJMD Kabupaten Malinau yaitu “ **Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: *“one village one product”* dengan semboyan *“Bertani Sehat”*** “, dengan Program Peningkatan Ketahanan Pangan melalui pembangunan Desa Mandiri pangan dan Pembangunan lumbung Desa, Peningkatan Kesejahteraan Petani, Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ;



Tabel 3.2
*Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*

Visi V: Meningkatkan peran serta Pertanian (Tanaman Pangan,Perkebunan, Peternakan dan Perikanan) dalam perekonomian Daerah melalui Pengembangan Produk Unggulan Desa.				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi Ke V “Meningkatkan peran serta Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan) dalam Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Produk Unggulan Desa			
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pembangunan Desa Mandiri Pangan dan Pembangunan Lumbung Desa.	Peningkatan Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan maksimal	Masih terbatasnya keterampilan petani dalam menggunakan ternologi budidaya tanaman pangan	Memberikan Pelatihan Budidaya Tanaman Pangan sesuai anjuran
	Program Peningkatan kesejahteraan Petani	Masih rendahnya pendapatan petani	Hasil produksi pertanian tanaman pangan masih rendah	Memberikan bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian
	Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian	Belum optimalnya pengolahan pasca panen produk pertanian	Pola Kosumsi pangan masyarakat belum beragam	Tersedianya keanekaragaman pangan lokal

Sumber : RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 dan Renstra Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Malinau Tahun 2016

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kalimantan Utara

Visi pembangunan dalam RPJM 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut dijabarkan menjadi Tujuh Misi serta Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA). Dalam aspek ideologi, PANCASILA 1 JUNI 1945 dan TRISAKTI menjadi ideologi bangsa sebagai penggerak, pemersatu perjuangan, dan sebagai bintang pengarah.



Kesembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) lima tahun ke depan adalah (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara, (2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, (8) Melakukan revolusi karakter bangsa, dan (9) Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan, melalui :

- a. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai dan bawang merah.
- b. Peningkatan kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pangan.
- c. Perbaikan kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat
- d. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan.
- e. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.

Berdasarkan rincian dari Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita) tersebut, maka agenda prioritas di bidang pertanian terdiri dari dua hal, yaitu :

- (1) Peningkatan Agroindustri, dan
- (2) Peningkatan Kedaulatan Pangan.



Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan Tujuh Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan
2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian
3. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit
4. Penguatan kelembagaan petani
5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian
6. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi
7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian

Selain tujuh strategi utama, terdapat Sembilan Strategi Pendukung sebagai berikut :

1. Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian
2. Peningkatan dukungan perkarantinaaan
3. Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi
4. Pelayanan informasi publik
5. Pengelolaan regulasi
6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
7. Pengelolaan perencanaan
8. Penataan dan penguatan organisasi
9. Pengelolaan sistem pengawasan

Pernyataan diatas memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Ketahanan Pangan. Sasaran dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau dengan mempertimbangkan sasaran dari Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya pencemaran yang dihasilkan dari kegiatan usaha dan aktifitas manusia;
- b. Pulihnya potensi sumber daya alam;
- c. Tersedianya informasi lingkungan hidup yang berkualitas;
- d. Membangun kesadaran dan peran aktif masyarakat atas hak dan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat di bidang lingkungan hidup.



Berdasarkan hasil identifikasi sebelumnya, faktor penghambat pelayanan Dinas Ketahanan Pangan adalah :

- Terbatasnya ketampilan petani dalam menggunakan teknologi budidaya tanaman pangan.
- Hasil produksi pertanian tanaman pangan masih rendah
- Pola Kosumsi pangan masyarakat belum beragam
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana apartur

Dan faktor pendorongnya adalah :

- Memberikan Pelatihan Budidaya Tanaman Pangan sesuai anjuran
- Memberikan bantuan sarana dan prasaran produksi pertanian
- Tersedianya keanekaragaman pangan lokal
- Pemanfaatan sarana dan prasarana seoptimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

Adapun hasil identifikasi faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota, dapat disusun pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi / Kabupaten/ Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Ketersediaan Pangan Utama dan peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan	Peningkatan Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan maksimal	Masih terbatasnya keterampilan petani dalam menggunakan ternologi budidaya tanaman pangan	Memberikan Pelatihan Budidaya Tanaman Pangan sesuai anjuran
2	Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tambah Hasil Produk Pertanian	Masih rendahnya pendapatan petani	Hasil produksi pertanian tanaman pangan masih rendah	Memberikan bantuan sarana dan prasaran produksi pertanian
3	Pengembangan Produksi dan Pengolahan Produksi Pasca Panen	Belum optimalnya pengolahan pasca panen produk pertanian	Pola Kosumsi pangan masyarakat belum beragam	Tersedianya keanekaragaman pangan lokal
4	Prosentasi Disiplin Kerja aparatur Dinas Ketahan Pangan	Belum optimalnya tingkat pelayanan kepada masyarakat	Masih terbatasnya sarana dan prasarana apartur	Pemanfaatan sarana dan prasarana seoptimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

Sumber : Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara dan Renstra Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Malinau Tahun 2016



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut. :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	
			Penghambat	Pendorong
1	Peningkatan alih fungsi lahan pertanian didaerah	Peningkatan Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan maksimal	Masih terbatasnya keterampilan petani dalam menggunakan ternologi budidaya tanaman pangan	Memberikan Pelatihan Budidaya Tanaman Pangan sesuai anjuran
2	Keterbatasan Infrastruktur Pertanian	Masih rendahnya pendapatan petani	Hasil produksi pertanian tanaman pangan masih rendah	Memberikan bantuan sarana dan prasaran produksi pertanian
3	Belum Optimalnya kawasan strategis Propinsi	Belum optimalnya pengolahan pasca panen produk pertanian	Pola Kosumsi pangan masyarakat belum beragam	Tersedianya keanekaragaman pangan lokal
4	Tofografi kawasan pertanian perbukitan dan bergunung - gunung serta kawasan pedalaman dan pedesaan/	Belum optimalnya tingkat pelayanan kepada masyarakat	Masih terbatasnya sarana dan prasarana apartur	Pemanfaatan sarana dan prasarana seoptimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

Sumber : Renstra Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Malinau Tahun 2016

Dari hasil identifikasi 32amper-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW yang terdiri dari :

1. Peningkatan alih fungsi lahan pertanian didaerah
2. Keterbatasan Infrastruktur Pertanian



- 3. Belum Optimalnya kawasan strategis Propinsi
- 4. Tofografi kawasan pertanian perbukitan dan bergunung – gunung serta kawasan pedalaman dan pedesaan

Implikasi RTRW tentang kawasan pertanian 33amper keseluruhan wilayah Kabupaten malinau memiliki topografi berbukit , bergunung – gunung, kawasan pedalaman dan pedesaan sehingga secara tidak langsung menyulitkan pelayanan Dinas kabupaten Malinau jika tidak didukung dengan sarana dan prasarana operasional.

Demikian pula selanjutnya dilakukan hal yang sama pada hasil telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	
			Penghambat	Pendorong
1	Peningkatan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian	Peningkatan Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan maksimal	Masih terbatasnya keterampilan petani dalam menggunakan ternologi budidaya tanaman pangan	Memberikan Pelatihan Budidaya Tanaman Pangan sesuai anjuran
2	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Prtanian	Masih rendahnya pendapatan petani	Hasil produksi pertanian tanaman pangan masih rendah	Memberikan bantuan sarana dan prasaran produksi pertanian
3	Belum terpadunya kegiatan antara kawasan perkotaan dan perdesaan	Belum optimalnya pengolahan pasca panen produk pertanian	Pola Kosumsi pangan masyarakat belum beragam	Tersedianya keanekaragaman pangan lokal
4	Peningkatan Saranan dan Prasaranan operasional pendukung pelayanan kepada masyarakat	Belum optimalnya tingkat pelayanan kepada masyarakat	Masih terbatasnya sarana dan prasarana apartur	Pemanfaatan sarana dan prasarana seoptimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

Sumber : Renstra Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Malinau Tahun 2016



3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari hasil review terhadap faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

- Ñ Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- Ñ Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- Ñ Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi / kabupaten / kota;
- Ñ Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- Ñ Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Dengan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan yaitu :

- Peningkatan Sumberdaya Apartur Dinas Ketahanan Pangan.
- Terbatasnya sarana dan prasarana operasional Dinas Ketahanan Pangan .
- Masih terbatasnya Aparatur Dinas Ketahanan Pangan sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal.

Diperoleh skor isu stategis antara lain :

Tabel 3.6
Kriteria Skor Kriteria Penentuan Isu – isu strategis.

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap capaian sasaran renstra KL atau Renstra Provinsi/Kab/Kota	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	25
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap public	20
4	Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah	15
5	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	15
Jumlah		100

Sumber : Analisis Swott Dinas Ketahanan Pangan 2016-2021



Tabel 3.7

Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-					Total Skor
		1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)
1	Peningkatan Sumberdaya Apartur Dinas Ketahanan Pangan	25	25	20	15	15	100
2	Terbatasnya sarana dan prasarana operasional Dinas Ketahanan Pangan	20	20	20	20	20	100
3	Masih terbatasnya Aparatur Dinas Ketahanan Pangan sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal.	25	25	20	15	15	100
Jumlah		70	70	60	50	50	100

Sumber : Analisis Swott Dinas Ketahanan Pangan 2016-2021

Tabel 3.8

Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Sumberdaya Apartur Dinas Ketahanan Pangan	100	25
2	Terbatasnya sarana dan prasarana operasional Dinas Ketahanan Pangan	100	25
3	Masih terbatasnya Aparatur Dinas Ketahanan Pangan sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal.	100	25

Sumber : Analisis Swott Dinas Ketahanan Pangan 2016-2021



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau

Perencanaan pembangunan daerah secara global merupakan pondasi awal perencanaan setiap satuan perangkat kerja di lingkungan pemerintah daerah dalam menyusun tahapan demi tahapan kinerja pada struktur dan teknis bidang masing – masing sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, dalam merencanakan setiap tahapan pembangunan jangka menengah bidang ketahanan pangan dengan memperhatikan setiap rincian domain perencanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat dan target pada periode yang bersangkutan.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, dalam rangka peningkatan setiap lini sektor pertanian dalam arti luas perlu dirumuskan visi dan misi sebagai pondasi awal kelembagaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Visi kelembagaan akan menjelelaskan arah tujuan atau potret ideal Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau sebagai instansi/lembaga kredibel di masa mendatang sebagai dukungan sebuah system birokrasi maupun pelayanan publik terhadap setiap keberhasilan pembangunan daerah.

Dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian bidang ketahanan pangan di Kabupaten Malinau maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah sebagai bahan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut tertuang didalam tabel berikut:

Tabel 4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan Mandiri	Prosentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Daerah	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan :	Kalori / Tahun	Kalori / Tahun	Kalori / Tahun	Kalori / Tahun	Kalori / Tahun	Kalori / Tahun
				1. Padi-padian	20,50	20.91	21.33	21.75	22.19	22.63
				2. Umbi-umbian	2,20	2.24	2.29	2.33	2.38	2.43
				3. Pangan Hewani	13,30	13.57	13.84	14.11	14.40	14.68
				4. Minyak dan Lemak	3,00	3.06	3.12	3.18	3.25	3.31
				5. Buah / Biji Berminyak	0,60	0.61	0.62	0.64	0.65	0.66
				6. Kacang-kacangan	9,70	9.89	10.09	10.29	10.50	10.71
				7. Gula	2,20	2.24	2.29	2.33	2.38	2.43
				8. Sayuran dan Buah	19,00	19.38	19.77	20.16	20.57	20.98
				JUMLAH	70,50	71,91	73,35	74,82	76,31	77,84

Sumber : Target IKU Dinas Ketahanan Pangan 2016-2021

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,

H. Saparudin, S.Sos., M.Si
NIP.19640125 198601 1 003



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan

Sebagai dinas teknis yang memiliki tugas pokok dan fungsi pada urusan pertanian dan pangan maka Dinas Ketahanan Pangan menjabarkan tujuan dan sasaran dengan cukup terarah pada kerangka pembangunan Kabupaten Malinau namun tetap mengerucut pada pola bidang pangan. Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategi (Renstra) diperlukan strategi dan kebijakan yang secara teknis disesuaikan pada arah pembangunan daerah sehingga tetap berjalan sesuai koridor perencanaan pembangunan secara menyeluruh. Penyusunan strategi dan kebijakan pada Renstra akan melibatkan keseluruhan elemen kelembagaan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program/kegiatan perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi sehingga mempermudah pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian dalam arti luas.

Strategi yang akan dikembangkan melalui optimalisasi dan pengembangan lahan, peningkatan sarana dan prasarana, meningkatkan produk berdaya saing, mengembangkan sistem distribusi pangan dan pemantauan harga pangan secara berkala, peningkatan ketersediaan dan pemantauan cadangan pangan masyarakat serta penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, meningkatnya pengelolaan sumber daya pertanian, peningkatan system tata kelola yang transparan berbasis teknologi informasi melalui peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan kualitas petani dan pelaku usaha.

Sedangkan kebijakan Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah, Meningkatkan Ketersediaan Pangan Utama, Menurunkan Jumlah Penduduk Rawan Pangan, Meningkatkan Diversifikasi pangan dan Gizi, Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok, Peningkatan kinerja instansi pemerintah, Peningkatan pembinaan dan pelatihan petani dan pelaku usaha.



Tabel 5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

VISI	“ Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun ”			
MISI ke V	Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: “one village one product” dengan semboyan “Bertani Sehat”			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	
Mewujudkan Ketahanan Pangan Mandiri	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatkan pendektesian dini kerawanan pangan	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan pembuatan PSVA (peta wilayah rawan pangan)• Meningkatkan pelatihan keterampilan penanganan pasca panen olahan hasil pertanian• Penyusunan analisis penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)• Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	
		Pengembangan Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar	Penyusunan dan Analisa Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi serta Pengembangan pengankaraman kosumsi pangan yang sehat dan aman	
		Menjaga stabilitas harga pangan pokok ditingkat produsen dan konsumen	Pengembangan Cadangan Pangan dan Sistem Informasi Harga, Pasokan dan Akses Pangan	

Sumber : RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 dan IKU Dinas Ketahanan Pangan 2016-2021



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau

Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. (UU No. 25 Th. 2004 Pasal 1 Ayat (16), PP No. 8 Th. 2008 Pasal 1 Ayat (13)).

Kegiatan adalah Bagian dari program yang dilakukan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi daripada atau kesemua jenis sumber daya tersebut (Permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007 Pasal 1 Ayat (8)). Oleh karena itu setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD.

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan permasalahan yang dihadapi. Program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2016-2021 meliputi program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Secara garis besar program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau adalah 4 program dan 24 kegiatan, sebagaimana tersebut dibawah ini:



**Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021**

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.	Penyediaan jasa peralatan kantor
2.	Penyediaan alat tulis kantor (ATK)
3.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Dalam dan Luar Daerah)
II.	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
5.	Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
III.	Program Peningkatan disiplin aparatur
6.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
IV.	Program Peningkatan Ketahanan Pertranian/Perkebunan
7.	Penanganan daerah rawan pangan
8.	Penyusunan data base potensi produk pangan
9.	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
10.	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
11.	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
12.	Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan
13.	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
14.	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
15.	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok
16.	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
17.	Pengembangan cadangan pangan daerah
18.	Pengembangan desa mandiri pangan
19.	Pengembangan diversifikasi pangan
20.	Pengembangan lumbung pangan desa
21.	Pengembangan model distribusi pangan efisien
22.	Pengembangan sistem informasi pasar
23.	Peningkatan mutu dan keamanan pangan
24.	Penyuluhan sumber pangan alternative



Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau

Penjelasan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang telah dipaparkan diatas akan lebih jelas dipaparkan kembali melalui Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 Terlampir adalah sebagai berikut :



TABEL 6
Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2016	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Kondisi Kinerja pada			
									2017		2018		2019		2020		2021		Akhir Priode RPJMD			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	TARGET	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4			5	6	7		8		9		10		11		12		13	14	15
Meningkatkan pengelolaan sumberdaya aparatur dan memperkuat kelembagaan petani secara optimal dan berkesinambungan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Kapasitas Sumberdaya aparatur secara optimal dan profesional	Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	1		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	-		359.69		244.50		239.27		248.13		215.67		1.307.25	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Malinau
			1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah prosentase penggunaan alat tulis kantor dalam satu tahun	-	90%	52.00	90%	50.50	90%	51.27	90%	53.17	90%	53.77	100%	260.71	Sub Bgian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Malinau
			1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah prosentase penggunaan barang cetakan dan penggandaan dalam satu thn	-		-	90%	14.00	90%	14.00	90%	14.52	90%	11.35	100%	14.00	Sub Bgian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Malinau



Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau

			1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah prosentase penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam satu tahun	-	90%	133.55	-	-	-	-	-	-	-	100 5	133.55	Sub Bgian Umum dan Kepega waian	Kabu paten Malinau	
			1	1	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah Prosentase Pelaksanaan Konsultasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketahanan Pangan	-	90%	174.14	90%	180.00	90%	174.00	90%	180.44	90%	150.55	100 5	859.13	Sub Bgian Umum dan Kepega waian	Kabu paten Malinau
			1	2		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur		-		-	-	-	-	25.92	-	26.88	-	52.79	Dinas Ketaha nan Pangan	Kabupa ten Malina u	
			1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al	Jumlah Unit Kendaraan dinas /Operasional yang terpelihara	-		-		-	1 Unit	-	1 Unit	25.93	1 Unit	26.89	1 Unit	52.82	Sub Bgian Umum dan Kepega waian	Kabu paten Malinau



Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau

			1	3		Program peningkatan disiplin aparat	Jumlah kapasitas aparat yang melaksanakan disiplin aparat		-	-	-	-	-	-	29.04	-	30.11		59.15	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Malinau	
			1	3	5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian daerah/olahraga aparat	-	-	-	30 Org	-	34 Org	29.04	34 Org	30.11	34 Org	59.15	Sub Bgian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Malinau		
Mewujudkan Ketahanan Pangan Mandiri	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatkan pendektesian dini kerawanan pangan.	1	16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Penurunan Angka Rawan Pangan	-		640.19		490		341	500		752.76		2.723.95			
			1	16	1	Data Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Jumlah Dokumen Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG);			209.90		-		40.00	2 Ds	40.00	2 Ds	53.77	10 Ds	343.67	Bidang Keterseidaan dan Kerawanan Pangan	Kabupaten Malinau
			1	16	4	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH)	Jumlah Dokumen Pembuatan Analisis Neraca Bahan Makanan	-	-	1 Dok	50.00	1 Dok	40.00	1 Dok	50.00	1 Dok	53.77	5 Dok	55.76	Bidang Keterseidaan dan Kerawanan Pangan	Kabupaten Malinau	
			1	16	12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Jumlah Orang / Kelompok Masyarakat Produktif yang terlatih dalam Pengelolaan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	-	50 Org	128.52	100 Org	100.00	100 Org	-	100 Org	100.00	100 Org	107.54	500 Org	436.06	Bidang Keterseidaan dan Kerawanan Pangan	Kabupaten Malinau



Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau

		Pengembangan Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar	1	16	2	Penyusunan data base potensi produk pangan	Jumlah Skor Persentase Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan	-	80%	94.69	80%	50.00	%	-	%	-	%	-	100%	144.69	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kabupaten Malinau
			1	16	3	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Jumlah Skor PPH Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	-		-			1 Dok	70.00	1 Dok	60.00	1 Dok	107.54	1 Dok	237.54	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kabupaten Malinau
			1	16	9	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkarangan	Jumlah Desa /KWT Optimalisasi dan Pemberdayaan Pemanfaatan Perkarangan Rumah	-		-	2 KWT	150.00	2 KWT	50.00	1 Pkt	100.00	1 Pkt	182.81	5 thn	482.81	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kabupaten Malinau
			1	16	22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Jumlah Petugas Penanganan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	-	50 Org	143.60	8 Org	140.00	Dok	40.00	Dok	40.00	Dok	64.52	Dok	428.12	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kabupaten Malinau
			1	16	30	Penyuluhan sumber pangan alternatif	Jumlah Persentase Pembinaan/ Sosialisasi tentang konsumsi panganan yang sehat beragam, bergizi dan seimbang	-		-				20.00		20.00		-	5 Thn	40.00	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kabupaten Malinau



Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau

		Menjaga stabilitas harga pangan pokok ditingkat produsen dan konsumen	1	16	6	Pemantauan Pasokan Distribusi Pangan	Jumlah Persentase Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	-	-	-	80%	25.00	85%	25.99	¹ Dok	53.77	90%	104.76	Bidang Distribusi dan cadangan Pangan	Kabupaten Malinau	
			1	16	11	Pemantauan harga pangan pokok	Jumlah Persentase Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	-	80%	63.48	-	85%	30.00	90%	30.00	95%	53.77	100%	177.25	Bidang Distribusi dan cadangan Pangan	Kabupaten Malinau
			1	16	13	Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah Persentase Kajian Responsif dan Antisipatif Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	-	-	-	85%	26.00	90%	25.00	95%	75.28	100%	126.28	Bidang Distribusi dan cadangan Pangan	Kabupaten Malinau	
												999.88		734.50		580.27		803.09		1.025.42	

Sumber : RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 dan IKU Dinas Ketahanan Pangan 2016-2021

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,

H. Saparudin, S. Sbs., M.Si
NIP. 19640125 198601 1 003



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021

Indikator kinerja merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya.

Pada halaman ini dikemukakan Indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016 – 2021 merupakan serangkaian rencana program yang strategik untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau menetapkan visi dan misi, dan menetapkan tujuan, serta sasaran sehingga akhirnya terbentuk rencana strategik yang meliputi kebijakan, dan program. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 ini akan terus disempurnakan dalam upaya terus meningkatkan daya guna dan hasil gunanya.

TABEL 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengaju Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Skor Nasional
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
((1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan	Kalori /Tahun	Kalori /Tahun	Kalori /Tahun	Kalori /Tahun	Kalori /Tahun	Kalori /Tahun	Kalori /Tahun	
	1 Padi-padian	20.50	20.91	21.33	21.75	22.19	22.63	25.00	
	2 Umbi-umbian	2.20	2.24	2.29	2.33	2.38	2.43	2.50	
	3 Pangan Hewani	13.30	13.57	13.84	14.11	14.40	14.68	24.00	
	4 Minyak dan Lemak	3.00	3.06	3.12	3.18	3.25	3.31	5.00	
	5 Buah / Biji Berminyak	0.60	0.61	0.62	0.64	0.65	0.66	1.00	
	6 Kacang-kacangan	9.70	9.89	10.09	10.29	10.50	10.71	10.00	
	7 Gula	2.20	2.24	2.29	2.33	2.38	2.43	2.50	
	8 Sayuran dan Buah	19.00	19.38	19.77	20.16	20.57	20.98	30.00	
	9 Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	70.50	71.91	73.35	74.82	76.31	77.84	100.00	

Sumber : LKJIP Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019



BAB VIII

PENUTUP

8.1 Kaedah Pelaksanaan

- Pelaksanaan RPJMD diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Malinau;
- Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang;
- Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
- Setiap SKPD, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, Bagian, dan Camat, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2016-2021;
- Setiap Pemerintah Desa agar mengacu pada RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 sebagai dasar penyusunan dokumen rencana, dan melaksanakan program dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
- Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau;
- Penyusunan RKPD Kabupaten Malinau harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten;
- RKPD Kabupaten Malinau harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran-SKPD (RKA-SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;



- Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Malinau merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, setiap SKPD perlu memperkuat peran pemangku kepentingan, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten Malinau, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat sipil;
- Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Malinau dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malinau, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Malinau untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

8.2 Dasar Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

- a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Renja Dinas Ketahanan Pangan dan RKA- Dinas Ketahanan Pangan dilakukan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
- b) Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Renja Dinas Ketahanan Pangan dan RKA- Dinas Ketahanan Pangan dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- c) Kepala Bappeda Kabupaten Malinau menyusun laporan evaluasi pelaksanaan RPJMD dan RKPD, dan menyusun laporan evaluasi kinerja SKPD berdasarkan hasil evaluasi Pimpinan SKPD;




Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau

- d) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (c) disampaikan kepada Bupati/Wakil Bupati sebagai dasar penilaian kinerja SKPD dan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Rencana Strategik Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau periode Tahun 2016 – 2021 merupakan serangkaian rencana program yang strategik untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau menetapkan visi dan misi, dan menetapkan tujuan, serta sasaran sehingga akhirnya terbentuk rencana strategik yang meliputi kebijakan, dan program. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 ini akan terus disempurnakan dalam upaya terus meningkatkan daya guna dan hasil gunanya.

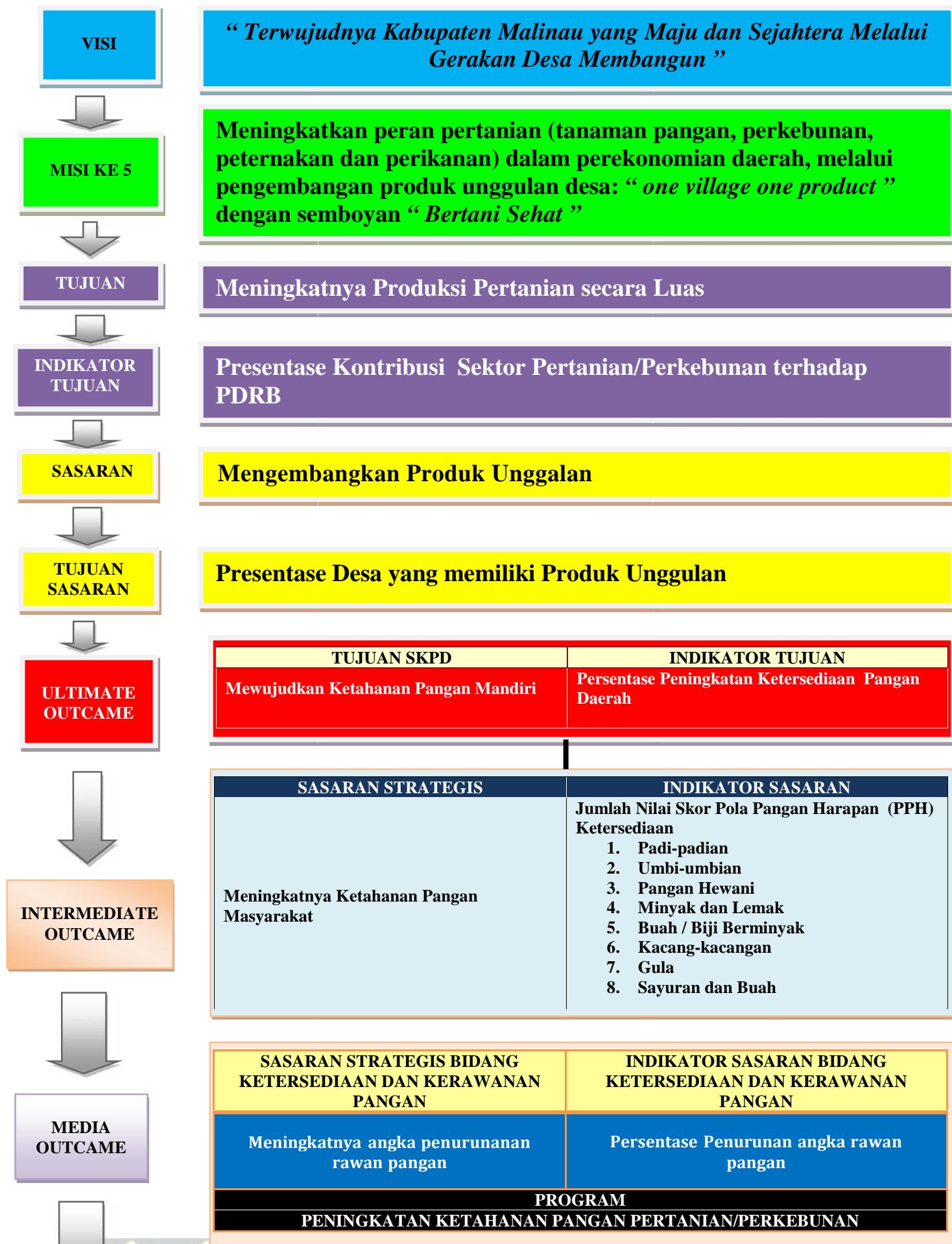
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,

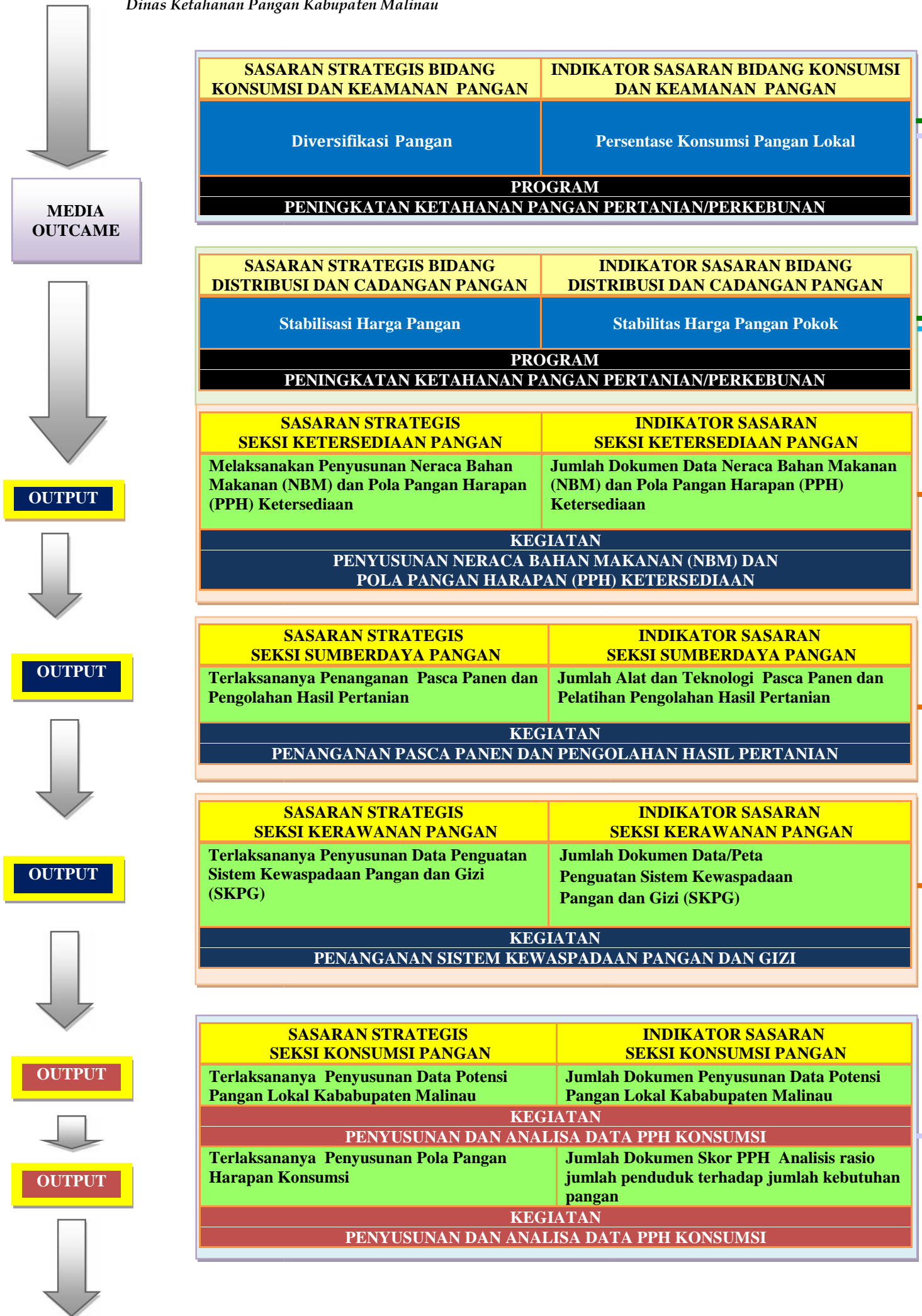


[Signature]
H. Sapaudin, S. Sos., M.Si
NIP.19640125 198601 1 003



CASCADING DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MALINAU







OUTPUT

OUTPUT

OUTPUT

OUTPUT

OUTPUT

OUTPUT

SASARAN STRATEGIS SEKSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	INDIKATOR SASARAN SEKSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
Terlaksananya Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Jumlah Dokumen Pembinaan / Sosialisasi tentang konsumsi panganan yang sehat, beragam, sehat, bergizi, seimbang dan promosi diversifikasi pangan yang dilaksanakan
KEGIATAN	
OPTOMALISASI PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN	
Terlaksananya Penyuluhan Sumber Pangan Alternatip	Jumlah Dokumen Pembinaan/Sosialisasi tentang kosumsi panganan yang sehat beragam, bergizi dan seimbang
KEGIATAN	
PENYULUHAN SUMBER PANGAN ALTERNATIF	

SASARAN STRATEGIS SEKSI KEAMANAN PANGAN	INDIKATOR SASARAN SEKSI KEAMANAN PANGAN
Tersedianya Dokumen mutu dan Keamanan Pangan serta Petugas Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah Dokumen Uji Sampel Pangan Segar, Dokumen Mutu dan Petugas PSAT/Dokumen Mutu OKKPD
KEGIATAN	
PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	

SASARAN STRATEGIS SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	INDIKATOR SASARAN SEKSI DISTRIBUSI PANGAN
Terlaksananya Pemantauan Pasokan Distribusi Pangan	Jumlah Dokumen Rantai Pasokan dan Pemasaran PanganJumlah Dokumen Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan
KEGIATAN	
PEMANTAUAN PASOKAN DAN DISTRIBUSI PANGAN	

SASARAN STRATEGIS SEKSI HARGA PANGAN	INDIKATOR SASARAN SEKSI HARGA PANGAN
Terlaksananya Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Jumlah Dokuman Data dan Informasi Harga pangan Pokok
KEGIATAN	
PEMANTAUAN DAN ANALISIS AKSES HARGA PANGAN POKOK	

SASARAN STRATEGIS SEKSI CADANGAN PANGAN	INDIKATOR SASARAN SEKSI CADANGAN PANGAN
Terlaksananya Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah Dokumen Kajian Responsif dan Antisipatif Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
KEGIATAN	
PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH	



DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MALINAU

JL. Pusat Pemerintahan Gedung C Lantai II Gabungan Dinas
Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara 77554

©Copyright_SungramKETAPANG

